

**DUALISME KEKUASAAN DAN POLITISASI SEPAKBOLA:  
KRISIS LEGITIMASI FEDERASI SEPAKBOLA INDONESIA  
(2010-2013)**



Muhammad Fathurrohman

1403621032

Skripsi yang Ditulis untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Muhammad Fathurrohman. Dualisme Kekuasaan dan Politisasi Sepakbola: Krisis Legitimasi Federasi Sepakbola Indonesia (2010-2013). **Skripsi**. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Penelitian ini mengkaji konflik dualisme dalam federasi sepak bola Indonesia dengan fokus pada krisis legitimasi PSSI sepanjang Oktober 2010–2013, yaitu sejak munculnya kompetisi yang berjalan tanpa persetujuan PSSI hingga fase penyatuan yang diklaim mengakhiri dualisme organisasi. Permasalahan penelitian dirumuskan melalui dua pertanyaan utama: mengapa konflik federasi merefleksikan krisis legitimasi dalam organisasi olahraga nasional dan bagaimana narasi “keabsahan” PSSI diproduksi serta diperebutkan oleh aktor-aktor berbeda. Tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah, yaitu menjelaskan karakter krisis legitimasi dan memetakan kontestasi narasi keabsahan dalam konflik tersebut.

Kerangka analisis menggunakan teori legitimasi Max Weber yaitu legal-rasional, tradisional, dan karismatik untuk membaca perebutan otoritas dan penerimaan sosial terhadap kepemimpinan federasi. Metode yang digunakan ialah metode sejarah deskriptif-naratif dengan tahapan penelitian mengikuti Kuntowijoyo (pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi), dengan pemanfaatan sumber primer (antara lain surat kabar) dan sumber sekunder (artikel/jurnal).

Hasil kajian menunjukkan bahwa dualisme tidak semata berwujud “dua kepengurusan/dua liga”, melainkan berupa fragmentasi otoritas yang dipertajam oleh sengketa prosedural, klaim legalitas, serta relasi kuasa yang memicu polarisasi kepatuhan stakeholder. Upaya rekonsiliasi menonjol melalui mediasi di Kuala Lumpur (7 Juni 2012) yang melahirkan kerangka penyatuan (MoU), namun implementasinya tetap memunculkan friksi hingga proses kongres penyatuan pada 2013.

**Kata kunci:** *dualisme PSSI, legitimasi, politisasi sepak bola.*

*Intelligentia - Dignitas*

## ABSTRACT

Muhammad Fathurrohman. *Dualism of Power and the Politicization of Football: The Legitimacy Crisis of the Indonesian Football Federation (2010-2013)*. **Undergraduate Thesis**. Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, State University of Jakarta, 2026.

This study examines the dualism conflict within Indonesia's football federation by focusing on the legitimacy crisis of PSSI during October 2010–2013, spanning from the emergence of a competition held without PSSI approval to the claimed unification phase that ended the organizational split. The research is guided by two central questions: why the federation conflict reflects a legitimacy crisis in a national sports organization, and how narratives of PSSI's "legitimacy" were produced and contested by different actors. The research objectives align with these questions, namely to explain the nature of the legitimacy crisis and to map the contestation over "legal" and "legitimate" authority within the conflict.

Analytically, the study applies Max Weber's legitimacy framework—legal-rational, traditional, and charismatic—to interpret struggles over authority, compliance, and social acceptance in the federation's leadership. Methodologically, it employs a descriptive-narrative historical approach, following Kuntowijoyo's stages (topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography), and draws on primary sources (including newspapers) and secondary sources (articles/journals).

The findings suggest that the dualism was not merely the presence of "two leagues" or "two administrations," but a broader fragmentation of authority intensified by procedural disputes, competing legal claims, and power relations that polarized stakeholder compliance. Reconciliation efforts were marked by the Kuala Lumpur mediation (7 June 2012) resulting in an MoU-based unification framework, yet implementation remained contentious and extended into the 2013 unification congress process.

**Keywords:** football politicization, legitimacy, PSSI dualism

*Intelligentia - Dignitas*

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum



| No. | Nama   | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|--|--------------|---------|
| 1.  | <u>Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum.</u><br>NIP. 197109222001122001<br>Ketua    |              | 21/1/26 |
| 2.  | <u>Sugeng Prakoso, S.S., M.T.</u><br>NIP. 197204212005011014<br>Penguji Ahli I |              | 20/1/26 |
| 3.  | <u>Sri Martini, S.S., M.Hum.</u><br>NIP. 197203241999032001<br>Penguji Ahli II |              | 24/1/26 |
| 4.  | <u>Dr. Djunaidi, M.Hum.</u><br>NIP. 196511281991031003<br>Pembimbing I         |              | 22/1/26 |
| 5.  | <u>Dr. M. Fakhruddin, M.Si.</u><br>NIP. 196505081990031005<br>Pembimbing II    |              | 21/1/26 |

Tanggal Lulus: 23 Januari 2026

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Muhammad Fathurrohman

NIM : 1403621032

Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dualisme Kekuasaan dan Politisasi Sepakbola: Krisis Legitimasi Federasi Sepakbola Indonesia (2010-2013)” adalah:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan dan rumusan penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan dari orang lain, kecuali bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 19 Januari 2026



Muhammad Fathurrohman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**UPT PERPUSTAKAAN**  
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telepon/Faksimili: (021) 4894221  
Laman: lib.unj.ac.id.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang  
bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fathurrohman  
NIM : 1403621032  
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah  
Alamat Surel : mfaturrohman07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk  
memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak  
Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul: **DUALISME KEKUASAAN DAN POLITISASI  
SEPAKBOLA: KRISIS LEGITIMASI FEDERASI SEPAKBOLA  
INDONESIA (2010-2013)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan  
Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet  
atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu  
meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan  
pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan  
hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Januari 2026

Muhammad Fathurrohman

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya.”*

- Bambang Pamungkas

*”Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.*

- Ali bin Abi Thalib



*Intelligentia Dignitas*  
Dipersembahkan untuk kedua orang tuaku dan kedua adikku serta semua orang  
yang selalu membersamaiku dalam suka maupun duka

## PRAKATA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Dualisme Kekuasaan dan Politisasi Sepakbola: Krisis Legitimasi Federasi Sepakbola Indonesia (2010-2013)”. Skripsi ini ditulis guna melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Tentu dalam tahap penulisan skripsi ini, penulis menghadai berbagai kesulitan dan hambatan yang terduga maupun tak terduga. Penulis juga memahami jika penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan secara sendiri. Maka, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat Bapak Firdaus Wajdi. S. Th.i., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Nuraeni Marta, SS. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Lalu yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Djunaidi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran nya untuk membimbing, memotivasi, dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih sebanyak-banyaknya juga penulis ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad fakhrudin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran nya untuk membimbing, memotivasi, dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku Ketua penguji, Penguji Ahli, serta Sekretaris Penguji karena telah memberikan saran dan masukan kepada skripsi ini. Dan tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh dosen Program

Studi Pendidikan Sejarah karena telah membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan ini.

Terima kasih sedalam-sedalamnya kepada kedua orang tua yang tersayang Alm Bapak Sugiyanto dan Mama Sugiyani serta kedua adik penulis yaitu Mas Alfin dan Dek Aulia dan satu kerabat penulis yaitu Mas Dila yang telah memberikan dukungan serta doa, moral, material, kasih dan sayang kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Terima kasih penulis ucapkan untuk seseorang yang telah menemani penulis selama penelitian ini, tak lupa kepada anggota grup “*Pasukan Ijo*”, “*Mikir Kids*”, “*Orang Ngawi*” yang telah menemani dan mendukung penulis melalui canda dan tawa serta motivasi yang mereka berikan selama pengerjaan skripsi ini, serta tak lupa terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Pendidikan Sejarah 2021 yang telah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun terakhir. Kepada Kedai Ayam Mas Baoy tak lupa penulis ucapkan terima kasih karena telah menemani dan menjadi pilihan penulis jika bingung untuk membeli makanan selama penulis menjalani perkuliahan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima masukan serta saran supaya bisa menjadi pembelajaran kedepannya, dan penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.

*Intelligentia - Dignitas*

Jakarta, Januari 2026

Muhammad Fathurrohman

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i    |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....   | iii  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....  | iv   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....   | v    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....   | vi   |
| <b>PRAKATA</b> .....   | v    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vii  |
| <b>DAFTAR ISTILAH</b> .....  | ix   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....  | xiv  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | xvi  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | xvii |
| <b>BAB I LATAR BELAKANG</b> .....  | 1    |
| A. <b>Dasar Pemikiran</b> .....  | 1    |
| B. <b>Pembatasan dan Perumusan Masalah</b> .....   | 7    |
| C. <b>Tujuan dan Kegunaan</b> .....  | 8    |
| D. <b>Landasan Teoritis</b> .....  | 9    |
| E. <b>Metode dan Bahan Sumber</b> .....  | 10   |
| <b>BAB II KONFLIK FEDERASI DAN KRISIS LEGITIMASI ORGANISASI<br/>PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)</b> .... | 15   |
| A. <b>Landasan Teoritis Legitimasi Organisasi</b> .....  | 15   |
| 1. <b>Konsep Legitimasi Dalam Organisasi Publik/Non-Profit</b> .....   | 15   |
| 2. <b>Sumber-sumber Krisis Legitimasi</b> .....  | 28   |
| B. <b>Konflik Struktural PSSI Sebagai Gejala Krisis</b> .....  | 31   |
| C. <b>Faktor Historis dan Struktural Pemicu Krisis Legitimasi</b> .....  | 35   |
| 1. <b>Hubungan Relasi Kuasa (<i>Power Relation</i>) dalam Struktur PSSI</b> .....                                      | 35   |
| 2. <b>Dominasi Kepentingan Non-Sepak Bola (Politik dan Bisnis)</b> .....   | 38   |
| <b>BAB III NARASI TENTANG “KEABSAHAN” PSSI DIPRODUKSI DAN<br/>DIPEREBUTKAN OLEH AKTOR-AKTOR BERBEDA</b> .....          | 42   |
| A. <b>Dualisme Kekuasaan sebagai Perebutan Legitimasi Antara PSSI dan<br/>KPSI</b> 42                                  |      |
| B. <b>Dampak serta Upaya Penyelesaian Konflik dan Penyatuan Federasi<br/>serta Liga Indonesia</b> .....                | 51   |
| <b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....   | 63   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>        | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>              | <b>73</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENELITI.....</b> | <b>87</b> |



*Intelligentia - Dignitas*

## DAFTAR ISTILAH

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Akuntabilitas                    | : Kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keputusan, kinerja, dan pengelolaan sumber daya kepada pemangku kepentingan/publik.                      |
| Breakaway league                 | : Istilah untuk kompetisi yang berjalan di luar otoritas asosiasi resmi; dipakai untuk menjelaskan posisi LPI yang tidak dinaungi PSSI.                      |
| Budaya tertutup                  | : Pola kerja organisasi yang cenderung tidak transparan terhadap publik/media, terutama terkait kebijakan strategis dan informasi organisasi.                |
| Dualisme                         | : Keterbelahan otoritas/struktur dan kepatuhan dalam satu sistem sepak bola (misalnya PSSI vs KPSI; ISL vs IPL), sehingga muncul dua klaim pusat kewenangan. |
| Eksklusi (stakeholder)           | : Kondisi ketika sebagian pihak (klub/anggota/pelaku) merasa tidak diakomodasi dalam proses keputusan organisasi, sehingga memicu resistensi.                |
| Eksternalisasi konflik           | : Kecenderungan membawa konflik internal organisasi ke luar sistem (pengadilan, arbitrase, FIFA/AFC) karena mekanisme internal tidak dipercaya.              |
| Fair Play                        | : Prinsip etika permainan dan perilaku organisasi/aktor sepak bola; dalam naskah terkait dengan rujukan pelanggaran etik.                                    |
| Fragmentasi otoritas             | : Melemahnya pengakuan tunggal terhadap kewenangan organisasi, sehingga kewenangan diperebutkan/terpecah oleh beberapa aktor.                                |
| Governance (tata kelola)         | : Cara organisasi diatur (aturan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, mekanisme sengketa) untuk mencapai tujuan secara tertib dan sah.                  |
| Hak suara                        | : Hak voting dalam kongres yang menentukan legitimasi prosedural keputusan dan kepengurusan.   |
| Illegal league (liga ilegal)     | : Liga yang dinilai tidak sah karena tidak berada di bawah asosiasi yang diakui; digunakan untuk menjelaskan LPI dalam relasi dengan Statuta FIFA dan PSSI.  |
| Implementasi kesepakatan         | : Tahap pelaksanaan hasil kompromi/nota kesepahaman; sering menjadi sumber friksi lanjutan karena perbedaan tafsir agenda.                                   |
| Incumbent                        | : Kelompok/pihak yang sedang berkuasa dalam struktur organisasi dan berpotensi memanfaatkan prosedur untuk mempertahankan posisi.                            |
| Induk organisasi cabang olahraga | : Organisasi puncak yang membina dan mengoordinasikan satu cabang olahraga; dalam naskah dipakai untuk menegaskan posisi PSSI sebagai otoritas sepak bola.   |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Intervensi                        | : Campur tangan pihak eksternal (terutama pemerintah) yang berpotensi dianggap melanggar prinsip independensi federasi; dalam naskah dibahas sebagai isu sensitif yang “dihindari” pemerintah. |
| Inner circle                      | : Lingkaran elite terbatas yang menguasai akses pada posisi puncak/keputusan strategis organisasi.   |
| Kericuhan registrasi              | : Ketegangan pada tahap pendaftaran peserta kongres sebagai dampak sengketa peserta dan voters.  |
| Kepatuhan prosedural              | : Strategi menampilkan kesahihan melalui prosedur formal (kongres, agenda, pengawasan FIFA/AFC).   |
| Klaim “keabsahan”                 | : Narasi/argumen untuk menyatakan pihak tertentu paling sah memimpin/mengatur organisasi, baik berdasar statuta, kongres, maupun pengakuan otoritas sepak bola global.                         |
| Komite Banding                    | : Perangkat internal organisasi untuk mengajukan banding atas putusan disiplin/etik; disebut sebagai bagian dari mekanisme legal-rasional.   |
| Komite Disiplin                   | : Perangkat internal organisasi untuk menegakkan disiplin dan sanksi; dalam naskah disorot karena dianggap tidak dipercaya/berpotensi jadi alat kekuasaan.                                     |
| Komite Eksekutif (Exco)           | : Organ pimpinan/eksekutif yang menentukan keputusan strategis organisasi; menjadi arena kontestasi jabatan/otoritas.  |
| Komite Etik                       | : Perangkat internal untuk menegakkan etika organisasi; dalam naskah diposisikan sebagai elemen penegakan hukum internal.  |
| Komite gabungan (Joint Committee) | : Instrumen unifikasi pasca-kesepakatan yang bertugas merancang penyatuan struktur liga dan isu organisasi, namun kemudian juga menjadi objek konflik pembubaran/keberlanjutan.                |
| Konflik implementasi              | : Konflik yang berlanjut pada tahap menjalankan kesepakatan (misalnya MoU), ketika perdebatan bergeser dari “siapa sah” ke “siapa berhak menafsirkan dan menjalankan”.                         |
| Konflik struktural                | : Konflik yang dipicu oleh struktur kewenangan, mekanisme keputusan, dan desain organisasi (bukan sekadar konflik personal).   |
| Kontrak sosial (PSSI)             | : Gagasan bahwa PSSI memiliki “tuntutan kewajiban publik” dalam kinerja dan tata kelola; kegagalan memenuhi tuntutan ini merusak legitimasi.   |
| Kontestasi legitimasi             | : Persaingan antaraktor untuk memperoleh pengakuan sah atas kepemimpinan/keputusan organisasi.   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Kongres                      | : Forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi yang menjadi pusat pertarungan prosedural (peserta, voters, agenda).                       |
| Kongres tahunan/biasa        | : Kongres rutin yang dijalankan sesuai jadwal organisasi; dalam konflik dipakai sebagai strategi “kepatuhan prosedural”.                      |
| Kongres luar biasa (KLB)     | : Kongres di luar jadwal yang diselenggarakan untuk keputusan/agenda luar biasa; dalam konflik dipakai untuk koreksi kepengurusan/legitimasi. |
| Krisis legitimasi            | : Krisis penerimaan/kepercayaan terhadap kewenangan organisasi, ditandai pembangkangan, dualisme struktur, dan klaim keabsahan tandingan.     |
| Legitimasi (Weberian)        | : Dasar penerimaan kekuasaan/otoritas; dalam naskah dipakai melalui tiga sumber: legal-rasional, tradisional, karismatik.                     |
| Legitimasi karismatik        | : Penerimaan yang bertumpu pada figur/karisma; cenderung tidak stabil dan bisa mengabaikan institusi.   |
| Legitimasi legal-rasional    | : Penerimaan berbasis aturan, prosedur, statuta, dan mekanisme organisasi; krisis muncul saat prosedur dianggap dimanipulasi.                 |
| Legitimasi tradisional       | : Penerimaan berbasis tradisi/pola lama; dalam naskah dikaitkan dengan dominasi oligarki dan jejaring non-sepak bola.                         |
| Liga tandingan               | : Kompetisi alternatif yang muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem liga yang ada; dalam naskah merujuk pada LPI terhadap LSI/ISL.        |
| Mafia wasit                  | : Istilah untuk praktik kecurangan/permainan pengaruh dalam perwasitan yang memperburuk kepercayaan publik terhadap liga.                     |
| Match-fixing/pengaturan skor | : Manipulasi hasil pertandingan; dipakai untuk menunjukkan krisis integritas dan legitimasi tata kelola.                                      |
| Mediasi                      | : Proses perundingan yang difasilitasi pihak ketiga untuk mencapai kompromi; dalam naskah menonjol pada peran Task Force AFC–FIFA.            |
| MoU (nota kesepahaman)       | : Dokumen kesepakatan yang menjadi kerangka penyatuan, termasuk pembentukan komite gabungan dan agenda penyelesaian.                          |
| Non-profit (nirlaba)         | : Karakter organisasi yang tidak berorientasi pembagian keuntungan kepada anggota; digunakan dalam kerangka organisasi publik/non-profit.     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Oligarki                   | : Penguasaan keputusan oleh segelintir elite; dipakai untuk menjelaskan hambatan perubahan dan tertutupnya akses kekuasaan organisasi.                  |
| Pecah kongsi               | : Istilah untuk menggambarkan pecahnya kesepakatan/koalisi yang membuat rekonsiliasi gagal dan konflik kembali tajam.                                   |
| Pemilik suara sah (voters) | : Pihak yang berhak memberikan suara dalam kongres; sengketa voters menjadi sumber krisis prosedural.   |
| Pengambilalihan kantor     | : Isu perebutan simbol otoritas (kantor PSSI) yang memperlihatkan eskalasi konflik di level operasional.  |
| Pengawasan FIFA/AFC        | : Keterlibatan otoritas sepak bola regional/global dalam menilai, menengahi, atau mengarahkan penyelesaian konflik.                                     |
| Penyatuan (unifikasi)      | : Proses mengakhiri dualisme melalui satu kerangka kesepakatan (penyatuan kompetisi, revisi statuta, pemulihan exco, verifikasi voters).                |
| Politisasi sepak bola      | : Masuknya kepentingan politik (partai/elite) dalam konflik dan kebijakan sepak bola; ditunjukkan lewat dukungan partai dan pertarungan pengaruh.       |
| Politik uang               | : Dugaan praktik transaksional dalam pemilihan/dukungan voters yang merusak kepercayaan terhadap proses kongres.  |
| Rekonsiliasi formal        | : Perdamaian yang diformalkan melalui agenda, pertemuan, atau dokumen (misalnya MoU), meskipun implementasinya masih diperdebatkan.                     |
| Revisi statuta             | : Perubahan aturan dasar organisasi sebagai bagian dari agenda penyelesaian konflik dan penataan ulang tata kelola.                                     |
| Sengketa prosedural        | : Konflik yang berakar pada prosedur (delegasi, voters, mekanisme pemilihan, agenda kongres).   |
| Sistem hukum internal      | : Perangkat aturan dan lembaga internal (disiplin, etik, banding) untuk menyelesaikan masalah secara adil; dalam naskah dinilai gagal/kurang dipercaya. |
| Status quo                 | : Keadaan/pola kekuasaan yang dipertahankan oleh pihak incumbent; dikaitkan dengan resistensi perubahan.  |
| Stakeholder                | : Pihak yang berkepentingan/terdampak (klub, anggota, pemain, suporter, pemerintah, otoritas internasional).  |
| Statuta                    | : Aturan dasar (FIFA/PSSI) yang dipakai sebagai rujukan legalitas kompetisi dan tindakan organisasi.  |
| Tenggat waktu (deadline)   | : Batas waktu yang ditetapkan FIFA/AFC untuk penyelesaian dualisme sebagai upaya menghindari sanksi.  |
| Tim Gugus Tugas            | : Tim/format kerja yang disebut pemerintah untuk koordinasi penyelesaian, dengan penekanan agar tidak dianggap intervensi.                              |

- Tim Nasional (Timnas) : Representasi nasional yang kinerjanya menjadi indikator legitimasi organisasi; kegagalan tata kelola dan prestasi disebut merusak legitimasi.
- Transparansi : Keterbukaan organisasi terhadap informasi dan proses keputusan; menjadi tuntutan utama dalam kritik terhadap budaya tertutup.
- Walk out : Aksi keluar dari forum (mis. kongres) sebagai bentuk protes terhadap prosedur/agendanya.



*Intelligentia - Dignitas*

## DAFTAR SINGKATAN



|           |   |   |
|-----------|---|---|
| AFC       | : | Asian Football Confederation (Konfederasi Sepak Bola Asia)              |
| AFF       | : | ASEAN Football Federation (Federasi Sepak Bola ASEAN)                   |
| APBD      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                  |
| BAORI     | : | Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia                             |
| BIVB      | : | Bandoengsche Indonesische Voetbalbond                                   |
| BOPI      | : | Badan Olahraga Profesional Indonesia                                    |
| BTN       | : | Badan Tim Nasional  |
| CAS       | : | Court of Arbitration for Sport (Badan Arbitrase Olahraga Internasional) |
| Exco      | : | Executive Committee (Komite Eksekutif)                                  |
| FA        | : | Football Association  |
| FIFA      | : | Fédération Internationale de Football Association                       |
| IPL       | : | Indonesia Premier League  |
| ISL       | : | Indonesia Super League  |
| IVBM      | : | Indonesische Voetbalbond Magelang                                       |
| JC        | : | Joint Committee (Komite Gabungan)                                       |
| Kemenpora | : | Kementerian Pemuda dan Olahraga   |
| KIP       | : | Komisi Informasi Pusat  |
| KLB       | : | Kongres Luar Biasa  |
| KOI       | : | Komite Olimpiade Indonesia  |
| KONI      | : | Komite Olahraga Nasional Indonesia                                      |
| KPSI      | : | Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia                                  |
| LPI       | : | Liga Primer Indonesia / Liga Premier Indonesia                          |
| LPIS      | : | Liga Prima Indonesia Sportindo  |
| MA        | : | Mahkamah Agung  |
| MoU       | : | Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)                          |
| MVB       | : | Madioensche Voetbalbond   |
| NIVB      | : | Nederlandsch Indische Voetbal Bond                                      |
| PSM       | : | Persatuan Sepak bola Mataram (konteks 1930)                             |
| PSSI      | : | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia                                  |
| SIVB      | : | Soerabajasche Indonesische Voetbalbond                                  |

|     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| UU  | : | Undang-Undang                    |
| VIJ | : | Voetbalbond Indonesische Jakarta |
| VVB | : | Vortstenlandsche Voetbalbond     |
| WO  | : | Walk Out                         |



*Intelligentia - Dignitas*

## DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Arifin Panigoro penggagas Liga Primer Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

gambar 2. Iwan Bule salah satu ketua umum PSSI dari kalangan aparat ..... **Error! Bookmark not defined.**

gambar 3. Laga pembuka Indonesia Premier League antara Persib dan Semen Padang ..... **Error! Bookmark not defined.**

gambar 4. Kekalahan terbesar Timnas Indonesia selama puluhan tahun terakhir ..... **Error! Bookmark not defined.**



*Intelligentia - Dignitas*

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 UU RI NO 11 Tahun 2002.....   | 73 |
| Lampiran 2 UU RI NO 3 Tahun 2005.....  | 74 |
| Lampiran 3 Jadwal Liga Super Indonesia 2013/2014 .....   | 75 |
| Lampiran 4 <i>Kompas</i> , 2 Januari 2011. "Semen Padang dan Deltras Paling<br>Dirugikan" .....          | 76 |
| Lampiran 5 <i>Kompas</i> , , 4 Januari 2011. "LPI Menyiapkan "Fee" untuk PSSI".<br>.....                 | 77 |
| Lampiran 6 <i>Kompas</i> , 5 Januari 2011. "Irfan Tidak Pedulikan ancaman PSSI".....                     | 78 |
| Lampiran 7 <i>Kompas</i> , 5 Januari 2011. "Menpora: Tak Boleh Ada Diskriminasi".<br>.....               | 79 |
| Lampiran 8 <i>Kompas</i> , 6 Januari 2011. "Jalan Berliku Menembus Liga".....                            | 80 |
| Lampiran 9 <i>Kompas</i> , 6 Januari 2011. "Panitia Belum Mengantongi Izin".....                         | 81 |
| Lampiran 10 <i>Kompas</i> , 7 Januari 2011. "BTN Buka Pintu Seleksi bagi Pemain<br>Klub-klub LPI". ..... | 82 |
| Lampiran 11 <i>Kompas</i> , 7 Januari 2011. "Silakan Berbondong-bondong Datang<br>ke Solo".....          | 83 |
| Lampiran 12 <i>Kompas</i> , 8 Januari 2011. "Surabaya Siap, 20.000 Tiket Dicitak".<br>.....              | 84 |
| Lampiran 13 <i>Kompas</i> , 9 Januari 2011. "KOI Harus Ambil Peran, Beri<br>Penjelasan ke FIFA". .....   | 85 |
| Lampiran 14 <i>Kompas</i> , 10 Januari 2011. "Gol Cepat Batavia Gulung Persibo".<br>.....                | 86 |

*Intelligentia - Dignitas*